

Ekonomi Islam: Solusi terhadap Berbagai Permasalahan Sosial-Ekonomi

Syaparuddin
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone
Email: safar_bone@yahoo.co.id

Abstract:

The goal of this article is to find some solutions to recover sosial-economic problems. It's focusing on Islamic economic concept. The history showed that the Islamic economic system was very effective to recover many kinds of social-economic problems, because it was implemented according to Alquran and Hadith. It means that if Islamic economy is implemented well and truely, many crucial social-economic problems can be anticipated. In short, Islamic economy can be made as a means to increase society's welfare. so that any social-economic problems won't apprear if Islamic economy is implemented well and truely.

Keywords: *Social-economic problems, Islamic Economic, solutions*

Pendahuluan

Sejak adanya kehidupan manusia di permukaan bumi, hajat untuk hidup secara kooperatif di antara manusia telah dirasakan dan telah diakui sebagai faktor esensial agar dapat bertahan dalam kehidupan. Seluruh manusia bergantung satu sama lain untuk memenuhi kebutuhannya. Ketergantungan mutualistik dalam kehidupan individu dan sosial diantara manusia telah melahirkan sebuah proses evolusi bertahap dalam pembentukan sistem pertukaran barang dan pelayanan. Dengan semakin berkembangnya peradaban manusia dari zaman ke zaman, sistem pertukaran ini berevolusi dari aktivitas yang sederhana kepada aktivitas ekonomi yang modern.

Ilmu ekonomi konvensional yang mendominasi pemikiran ekonomi modern, telah menjadi sebuah disiplin ilmu yang sangat maju dan canggih, melalui suatu proses pengembangan panjang selama lebih dari satu abad. Tidak dapat dipungkiri bahwa ilmu ekonomi konvensional memberikan kontribusi yang amat besar bagi kemajuan kehidupan manusia secara materiil, terutama sesudah Perang Dunia II. Pada masa ini, revolusi ekonomi mampu memberikan kesejahteraan kepada manusia, bersamaan dengan meningkatnya produksi,

membaihnya sarana komunikasi dan bertambahnya kemampuan eksploitasi sumber daya alam. Standar hidup di antara kelas pekerja menjadi lebih tinggi daripada bila mereka hanya bergantung pada pertanian.

Namun pada perkembangannya, ekonomi konvensional terbukti gagal mempertahankan idealismenya. Kondisi-kondisi ideal yang dijadikan asumsi dalam teori ekonomi konvensional tidak pernah tercapai. Bahkan dalam setengah abad terakhir, ekonomi konvensional semakin menampakkan kelemahannya. Timbulnya kapitalisme memperbesar kesenjangan antar orang kaya dan orang miskin, antara pekerja dan pemilik modal, antara negara maju dan negara berkembang serta menyebabkan tingginya inflasi dan bertambahnya jumlah pengangguran. Hasil penelitian *The New Economics Foundation* (NEF), sebuah lembaga riset yang berkedudukan di Inggris, tentang hubungan antara pertumbuhan pendapatan per kapita dengan proporsi atau *share* dari pertumbuhan tersebut yang dinikmati oleh kaum miskin, menemukan dan membuktikan bahwa pada dekade 1980-an, dari setiap kenaikan 100 \$ AS pendapatan per kapita dunia, maka kaum miskin hanya menikmati 2,2 \$ AS, atau sekitar 2,2 persen. Artinya 97,8 persen lainnya dinikmati oleh orang-orang kaya. Kemudian pada kurun waktu tahun 1990 hingga 2001, setiap kenaikan pendapatan per kapita sebesar 100 \$ AS, maka persentase yang dinikmati oleh orang-orang miskin hanya 60 sen saja, atau sekitar 0,6 persen. Sedangkan sisanya, yaitu 99,4 persen, dinikmati oleh kelompok kaya dunia. Hal tersebut menunjukkan adanya penurunan *share* kelompok miskin sebesar 73 persen dan hingga saat sekarang ini kesenjangan tersebut semakin menjadi-jadi. Fakta tersebut menunjukkan bahwa perekonomian dunia saat ini cenderung bergerak kepada ketidakseimbangan penguasaan aset dan sumber daya ekonomi, yang menjadikan kelompok kaya menjadi semakin kaya dan kelompok miskin semakin miskin. Ironisnya fakta tersebut paralel dengan kenyataan di banyak negara Muslim, di mana strategi *trickle down effect* yang dahulu begitu diagung-agungkan, ternyata hanya menghasilkan kesenjangan sosial yang luar biasa besar (Mannan, 1986: 47).

Dalam kondisi seperti ini, maka selama tiga atau empat dekade terakhir mulai dikembangkan sistem perekonomian Islam sebagai solusi kondisi

perekonomian internasional. Alquran sebagai kitab suci umat Islam bukan hanya mengatur masalah ibadah yang bersifat ritual, tetapi juga memberikan petunjuk yang sempurna (komprehensif) dan abadi (universal) bagi seluruh umat manusia. Alquran mengandung prinsip-prinsip dan petunjuk-petunjuk yang fundamental untuk setiap permasalahan manusia, termasuk masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi. Prinsip-prinsip ekonomi yang ada dalam berbagai ayat di Alquran dilengkapi dengan sunah-sunah dari Rasulullah s.a.w. melalui berbagai bentuk Hadis dan diterangkan lebih rinci oleh para fuqaha pada saat kejayaan *dīnu al-Islām* baik dalam bentuk Ijma atau Qiyas maupun Ijtihad (Chapra, 2000: 2-4).

Pada masa Rasulullah Saw, Islam memberikan ruang yang sangat luas bagi berkembangnya perekonomian. Salah satu prinsip dasar dalam muamalah adalah bahwa segala sesuatu hukumnya mubah, kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya, menjadi pendorong utama inovasi ekonomi yang mempercepat pertumbuhan ekonomi Islam.

Pada masa Khulafaur al-Rashidin, ilmu ekonomi semakin berkembang. Pada masa ini masyarakat mencapai taraf kesejahteraan yang tinggi, yang semakin bertambah pada masa Umar bin Abdul Aziz. Ekonomi Islam mencapai puncak kejayaannya seiring dengan kejayaan Islam secara keseluruhan pada masa khalifah Harun al-Rashid. Masa kekhalifahan Harun al-Rashid berlangsung hampir seperempat abad (170-193H/786-809 M), ketika Baghdad tumbuh dari sebuah kekosongan menjadi pusat dunia kekayaan dan pendidikan. Pada masa ini, aktivitas-aktivitas komersial berkembang sampai ke Cina. Ketersediaan bantuan keuangan yang melimpah bagi para mahasiswa dan sarjana menjadikan dunia muslim sebagai suatu tempat pertemuan bagi para sarjana dari segala bidang pengajaran dan berbagai aliran dan agama. Keadilan dalam sistem perpajakan pertanian menghasilkan tingginya produksi pertanian dan meningkatnya kesejahteraan petani (Al-Asfahani, IX: 3375).

Namun berbagai permasalahan internal dan eksternal umat Islam, termasuk kerusakan moral dan peristiwa perang salib, telah melemahkan ekonomi Islam dan menghentikan perkembangan ekonomi Islam selama satu setengah

abad. Berdasarkan sejarah yang menunjukkan efektifitas sistem perekonomian Islam bila dilaksanakan sesuai tuntunan Allah dan Rasul-Nya, sistem ekonomi Islam kembali dilirik sebagai solusi berbagai permasalahan sosial ekonomi internasional. Jika instrumen ekonomi Islam diimplementasikan dengan baik dan benar, maka masalah-masalah krusial perekonomian dapat diantisipasi sehingga tidak menimbulkan krisis ekonomi maupun finansial sebagaimana yang saat ini tengah terjadi. Dengan demikian, ekonomi Islam dapat digunakan sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi, secara umum, didefinisikan sebagai hal yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia. Sementara, Islam sebagai agama Allah, mengatur kehidupan manusia baik kehidupan di dunia maupun akhirat. Dengan demikian ekonomi merupakan suatu bagian dari agama (Islam), karena ia adalah bagian dari kehidupan manusia. Kalau ia adalah suatu bagian dari agama maka tentulah ia ada dalam sumber yang mutlak yaitu Alquran dan al-Sunnah, yang menjadi panduan dalam menjalani kehidupan. Kedudukan sumber yang mutlak ini menjadikan Islam sebagai suatu agama yang istimewa dibandingkan dengan agama lain sehingga dalam membahas perspektif ekonomi Islam segalanya bermuara pada akidah Islam berdasarkan *al-Qur'ān al-karīm* dan *al-Sunnah al-nabawiyyah* (Misanam, 2008: 14).

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Ekonomi Islam itu adalah sistem yang mengaplikasikan prinsip ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam, bagi setiap kegiatan ekonomi yang bertujuan menciptakan barang & jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Jika dilihat dari tujuannya, sekilas tidak ada perbedaan antara ekonomi Islam dan sistem ekonomi lainnya, yaitu untuk mencari pemenuhan berbagai keperluan hidup manusia, baik bersifat pribadi atau kolektif. Demikian juga dengan prinsip dan motifnya, di mana setiap orang atau masyarakat berusaha mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya dengan tenaga atau biaya yang sekecil-

kecilnya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Namun sesungguhnya ekonomi Islam secara mendasar berbeda dari sistem ekonomi yang lain dalam hal tujuan, bentuk dan coraknya. Sistem tersebut berusaha memecahkan masalah ekonomi manusia dengan cara menempuh jalan tengah antara pola yang ekstrim yaitu kapitalis & sosialis. Singkatnya ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berdasar pada Alquran & Hadis yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia di dunia dan akhirat.

Untuk memberikan pengertian yang lebih jelas maka berikut disampaikan definisi ekonomi Islam dari berbagai ahli ekonomi Muslim terkemuka saat ini. Definisi ekonomi Islam yang diberikan oleh mereka bervariasi, tetapi pada dasarnya mengandung makna yang sama, yaitu sebagai berikut:

1. Mohammad Abdul Mannan (1986: 18) mendefinisikan ekonomi Islam sebagai ilmu yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam.
2. Umar Chapra (1996: 33, 1992: 7) menganggap ekonomi Islam sebagai cabang dari ilmu yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka, yang sejalan dengan ajaran Islam, tanpa membatasi kebebasan individu, menciptakan ketidakseimbangan makroekonomi dan ekologi yang berkepanjangan, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta jaringan moral masyarakat.
3. Mohammad Nejatullah Siddiqi (1992: 69) mengartikan ekonomi Islam sebagai tanggapan pemikir-pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada zamannya. Dalam upaya ini mereka dibantu oleh Alquran dan Hadis, serta alasan dan pengalaman.
4. Hasanuz Zaman (1984: 52) menegaskan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu dan aplikasi hukum syariah untuk mencegah terjadinya ketidakadilan atas pemanfaatan dan pembuangan sumber-sumber materiil dengan tujuan untuk memberikan kepuasan manusia dan melakukannya sebagai kewajiban kepada Allah dan masyarakat.

5. Syed Nawab Haider Naqvi (1994: 18) menyebutkan bahwa ekonomi Islam merupakan studi mengenai representasi perilaku muslim dalam suatu masyarakat muslim tertentu.
6. Mohammad Akram Khan (1994: 33) menegaskan bahwa ekonomi Islam merupakan studi yang memusatkan perhatian pada kesejahteraan manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya di bumi ini atas dasar kerjasama dan partisipasi.

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam bukan hanya merupakan praktik kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu dan komunitas muslim yang ada, namun juga merupakan perwujudan perilaku ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam. Oleh karena itu, ia mencakup cara memandang permasalahan ekonomi, menganalisis dan mengajukan alternatif solusi atas berbagai permasalahan ekonomi.

Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Terkait dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, Adiwarman Karim (2007: 33-46) menjelaskan bahwa prinsip-prinsip yang membentuk keseluruhan kerangka ekonomi Islam, sebagai berikut:

1. Nilai-Nilai Universal: Teori Ekonomi

Bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal yakni: *Tauhid* (Keesaan Tuhan), *Adl* (Keadilan), *Nubuwwah* (Kenabian), *Khilāfah* (Pemerintahan) dan *Ma'ad* (Hasil). Kelima dasar ini menjadi inspirasi untuk menyusun proposisi-proposisi dan teori ekonomi Islam.

- a. *Tauhid* (Keesaan Tuhan). *Tauhid* merupakan fondasi ajaran Islam. Allah pemilik alam semesta dan semua sumber daya yang ada karena Allahlah yang menciptakan alam semesta dan beserta isinya. Oleh karena itu Allah adalah pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanah untuk memiliki sementara waktu. Dalam Islam semua yang diciptakan Allah ada manfaat dan tujuannya. Tujuan manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepada-Nya (QS 51:56), karena itu segala aktivitas yang ada hubungannya dengan alam (sumber daya) dan manusia (muamalah) dibingkai dalam kerangka

hubungan dengan Allah. Karena kepada-Nya kita akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.

- b. *'Adl* (Keadilan). Dalam Islam, *'adl* didefinisikan sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa para pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkelompok-kelompok dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia.
- c. *Nubuwwah* (Kenabian). Allah mengutus para nabi dan rasul untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dari Allah tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia dan mengajarkan jalan untuk kembali (taubah) ke asal muasal segala, yaitu Allah. Fungsi rasul adalah untuk menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan dunia dan akhirat. Rasul terakhir dan sempurna yang harus diteladani sampai akhir zaman adalah Nabi Muhammad SAW. Kegiatan ekonomi dan bisnis manusia harus mengacu pada prinsip-prinsip yang telah diajarkan oleh nabi dan rasul. Sifat-sifat Rasul yang harus diteladani, yaitu: *siddīq* (benar, jujur), *amānah* (bertanggung-jawab, *credible*), *fatānah* (cerdas, bijaksana, intelek) dan *tablīgh* (komunikatif, terbuka, ahli marketing).
- d. *Khilāfah* (Pemerintahan). Manusia adalah khalifah Allah di muka bumi, karena itu pada dasarnya manusia adalah pemimpin. Dalam hadis Nabi s.a.w. disebutkan bahwa, setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Nilai ini mendasari prinsip kehidupan kolektif manusia dalam Islam. Fungsi utamanya adalah agar menjaga keteraturan interaksi (*mu'āmalah*) antar kelompok, agar kekacauan dan keributan dapat dihilangkan atau dikurangi. Dalam Islam pemerintah memegang peranan penting dalam perekonomian. Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syariah dan untuk memastikan supaya tidak terjadi pelanggaran

terhadap hak-hak manusia. Semua ini dalam kerangka pencapaian *maqās id sharī'ah* yaitu memajukan kesejahteraan manusia.

- e. *Ma'ad* (Hasil). Hidup manusia tidak hanya di dunia, karena kita semua akan kembali kepada Allah. Allah melarang kita terikat pada dunia (QS. 31: 33) sebab bila dibandingkan dengan kesenangan akhirat, kesenangan dunia tidaklah seberapa. Manusia diciptakan untuk berjuang (QS. 90: 4). Perjuangan akan mendapat ganjaran/ imbalan. Perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan berlipat-lipat, perbuatan jahat akan mendapat hukuman yang setimpal. Prinsip ini menjadi motivasi dalam ekonomi dan bisnis, bahwa laba tidak hanya laba dunia tetapi meliputi laba akhirat. Karena itu konsep *profit* mendapat legitimasi dalam Islam.

2. Prinsip-Prinsip Derivatif: Ciri-ciri Sistem Ekonomi Islam.

Dari kelima nilai-nilai universal tersebut dibangunlah tiga prinsip derivatif yang menjadi ciri-ciri dan cikal bakal sistem ekonomi Islam. Ketiga prinsip derivatif itu adalah: *multiple ownership*, *freedom to act* dan *social justice*.

a. *Multiple Ownership* (Kepemilikan dengan Berbagai Jenis).

Nilai *tauhid* dan *'adl* melahirkan konsep *multiple ownership*. Prinsip ini terjemahan dari nilai Tauhid: pemilik primer langit dan bumi dan seisinya adalah Allah s.w.t, sedangkan manusia diberi amanah untuk mengelolanya. Jadi manusia dianggap sebagai pemilik sekunder, dengan demikian dalam ekonomi Islam kepemilikan pribadi atau swasta diakui. Namun untuk menjamin keadilan, supaya tidak terjadi kezaliman, eksploitasi manusia atas manusia, maka cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Dengan demikian kepemilikan Negara dan nasionalisasi juga mendapat tempat dalam Islam. Sistem kepemilikan campuran, baik swasta-negara, swasta domestik-asing atau Negara asing juga diakui dalam ekonomi Islam.

b. *Freedom to Act* (Kebebasan untuk Berusaha).

Pelaku-pelaku ekonomi yang menjadikan nabi dan rasul sebagai teladan dan model dalam melakukan aktivitasnya akan melahirkan pribadi-pribadi profesional dan prestatif dalam segala bidang. Keempat nilai *nubuwwah*:

siddīq, amānah, fatḥānah dan *tablīgh* bila digabung dengan nilai keadilan dan *khilāfah* (*good governance*) akan melahirkan prinsip *freedom of act*. *Freedom of act* akan menciptakan mekanisme pasar, dengan syarat tidak ada distorsi (proses penzaliman). Potensi distorsi dikurangi dengan penghayatan nilai keadilan. Negara bertugas untuk menyingkirkan atau mengurangi *market distortion* dan bertindak sebagai wasit yang mengawasi interaksi (*mu'āmalah*) pelaku-pelaku ekonomi dan bisnis untuk menjamin tidak dilanggarnya syariah, sehingga tercipta iklim ekonomi yang sehat.

- c. *Social Justice* (Keadilan Sosial). Gabungan nilai *khilāfah* dan *ma'ad* melahirkan prinsip keadilan sosial. Dalam Islam, pemerintah bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya dan menciptakan keseimbangan sosial si kaya dan si miskin. Semua sistem ekonomi mempunyai tujuan yang sama, yaitu menciptakan sistem perekonomian yang adil. Namun tidak semua sistem mampu dan secara konsisten menciptakan sistem yang adil. Sejarah dan kenyataan membuktikan sistem kapitalis dan sosialis gagal mewujudkan keadilan di kalangan masyarakat. Ekonomi Islam merupakan jawaban atau jalan keluar yang rasional untuk mewujudkan keadilan di kalangan masyarakat.

3. Akhlak: Perilaku Islami dalam Perekonomian.

Semua nilai dan prinsip di atas dipayungi oleh konsep akhlak. Akhlak menempati posisi puncak, karena inilah tujuan Islam dan dakwah para Nabi, yakni menyempurnakan akhlak manusia. Dalam hadis Nabi s.a.w. disebutkan bahwa sesungguhnya Nabi s.a.w. diutus untuk menyempurnakan kemuliaan-kemuliaan akhlak (*Innamā bu'ithu li-utammima makārima al-akhlāq*). Akhlak inilah yang menjadi panduan para pelaku ekonomi dan bisnis dalam melakukan aktivitasnya. Namun harus dicermati, walaupun sistem ekonomi Islam mempunyai landasan yang kuat dan prinsip-prinsip ekonomi yang mantap bukan jaminan perekonomian umat Islam akan otomatis menjadi maju. Sistem ekonomi Islam hanya memastikan bahwa tidak ada transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syariah. Tetapi kinerja bisnis tergantung pelaku ekonomi, yang memungkinkan dipegang oleh orang nonmuslim. Perekonomian umat

Islam baru dapat maju bila pola pikir dan pola tingkah laku muslimin dan muslimat sudah profesional (*ihsān, itqān*). Akhlak menjadi indikator, penentu keberhasilan bisnis yang dijalankan.

Tujuan Ekonomi Islam

Ekonomi konvensional telah mencanangkan dua tujuan. Tujuan yang pertama bersifat positif dan berhubungan dengan realisasi efisiensi dan pemerataan dalam alokasi dan distribusi sumber-sumber daya. Tujuan yang lain dapat dianggap sebagai normatif dan diungkapkan dalam bentuk tujuan sosioekonomi yang secara universal diinginkan, seperti pemenuhan kebutuhan, keadaan kesempatan kerja penuh, laju pertumbuhan ekonomi yang optimal, distribusi pendapatan yang adil (merata), stabilitas ekonomi dan keseimbangan lingkungan hidup (Chapra, 1996: 13-14).

Sepintas lalu kedua tujuan ini sangat ideal, karena dimaksudkan untuk melayani kebutuhan individu dan masyarakat. Namun dalam prakteknya, kedua tujuan ini menjadi tidak konsisten. Bahkan negara-negara yang kaya ternyata tidak mampu memenuhi tujuan normatifnya, sekalipun mereka memiliki sumber-sumber daya yang besar. Jika sebagian tujuan ini terwujud, hal ini hanya dapat dilakukan dengan merugikan tujuan yang lain. Misalnya, tujuan efisiensi dengan penggunaan mesin industri diperoleh dengan merugikan tujuan perluasan kesempatan kerja, atau sebaliknya. Bukti-bukti menunjukkan bahwa kegagalan ini semakin nyata di seluruh belahan dunia.

Ekonomi Islam, selain berkonsentrasi pada alokasi dan distribusi sumber-sumber daya -seperti pada ekonomi konvensional- namun tujuan utamanya adalah merealisasikan *maqās id sharī'ah*. Imam al-Ghazali (1422 H: 352) menjelaskan bahwa tujuan utama syariah (*maqās id sharī'ah*) adalah mendorong kesejahteraan manusia, yang terletak pada perlindungan terhadap agama mereka (*dīn*), diri (*nafs*), akal, keturunan (*nasl*) dan harta benda (*māl*). Keimanan (agama) ditempatkan pada urutan pertama, karena berpengaruh secara signifikan terhadap hakikat, kuantitas dan kualitas kebutuhan materi maupun psikologi serta cara memuaskannya. Harta benda ditempatkan pada tujuan terakhir bukan karena

dianggap tidak penting, melainkan bahwa kemampuan harta dalam mewujudkan kebahagiaan manusia akan sangat bergantung pada manusia itu sendiri. Dengan kata lain, harta saja sebagai benda tidak dengan sendirinya mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia. Diri, akal dan keturunan berkaitan erat dengan manusia itu sendiri, sehingga kebahagiaannya menjadi tujuan utama syariah. Dengan memasukkan diri manusia, akal dan keturunannya akan memungkinkan terciptanya suatu pemenuhan yang seimbang terhadap semua kebutuhan hidup manusia.

Dengan berpatokan pada penjelasan *maqāṣ al-sharī'ah* di atas, maka dapat dirumuskan bahwa tujuan ekonomi Islam itu sebagai berikut:

- a. Kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral Islam (dasar pemikiran yaitu: QS. al-Baqarah ayat 2 & 168, al-Maidah ayat 87-88, al-Jumu'ah ayat 10).
- b. Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid, berdasarkan keadilan dan persaudaraan yang universal (dasar pemikiran yaitu: QS. al-Hujurāt ayat 13, al-Maidah ayat 8, al-Shu'arā' ayat 183).
- c. Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata (dasar pemikiran yaitu: QS. al-An'am ayat 165, al-Nahl ayat 71, al-Zukhruf ayat 32).
- d. Menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial (dasar pemikiran yaitu: QS. al-Ra'du ayat 36, Luqman ayat 22).

Ekonomi Islam Berbasis Sektor Riil

Krisis ekonomi saat ini telah membuat para pemimpin dunia disibukkan oleh upaya mencari jalan keluar untuk menghentikannya akibat kecelakaan fatal ekonomi keuangan mereka. Paket penyelamatan krisis pun telah disiapkan dengan total dana yang tidak tanggung-tanggung: 3.4 triliun \$ AS (AS: 700 miliar \$; Inggris: 691 miliar \$; Jerman: 680 miliar \$; Irlandia: 544 miliar \$; Prancis: 492 miliar \$; Rusia: 200 miliar \$ dan negara-negara Asia: 80 miliar \$ (Kompas, 2008).

Krisis ekonomi tersebut di atas bukanlah yang pertama maupun yang terakhir. Mungkin dapat dikatakan bahwa sejarah ekonomi Kapitalisme adalah

sejarah krisis. Roy Davies dan Glyn Davies (1996), dalam buku *The History of Money from Ancient time to Present Day*, menguraikan sejarah kronologi krisis ekonomi dunia secara menyeluruh. Menurut keduanya, sepanjang Abad 20 telah terjadi lebih 20 kali krisis besar yang melanda banyak negara. Ini berarti, rata-rata setiap 5 tahun terjadi krisis keuangan hebat yang mengakibatkan penderitaan bagi ratusan juta umat manusia.

Sebab utama krisis ekonomi dapat dilacak dari dominasi sektor moneter/keuangan (sistem uang kertas [*flat money*], perbankan ribawi, pasar modal, bursa saham, valas dan lain-lain) atas sektor perdagangan dan jasa yang bersifat riil. Sebelum krisis moneter di Asia tahun 1997/1998, misalnya, dalam satu hari, dana yang beredar dalam transaksi semu di pasar modal dan pasar uang dunia diperkirakan rata-rata sekitar 2-3 triliun \$ AS, atau dalam satu tahun sekitar 700 triliun \$ AS. Sebaliknya, arus perdagangan barang secara internasional dalam satu tahunnya hanya berkisar 7 triliun \$ AS. Jadi, arus uang 100 kali lebih cepat dibandingkan dengan arus barang (Republika, 2000).

Besaran transaksi yang terjadi di pasar uang dunia berjumlah 1,5 triliun \$ AS dalam sehari. Sebaliknya, besaran transaksi pada perdagangan dunia di sektor riil hanya 6 triliun \$ AS setiap tahunnya. Jadi, perbandingannya adalah 500 : 6. Dengan kata lain, transaksi di sektor riil hanya sekitar 1%-an dari sektor keuangan (Kompas, 2007).

Sementara itu, menurut Kompas September 2007, uang yang beredar dalam transaksi valas mencapai 1,3 triliun dalam setahun. Data ini menunjukkan bahwa perkembangan cepat sektor keuangan semakin melejit meninggalkan sektor riil. Ini adalah sebagai akibat dari pemisahan sektor finansial dengan sektor riil.

Dalam ekonomi Islam, sektor finansial selalu mengikuti pertumbuhan sektor riil. Inilah perbedaan konsep ekonomi Islam dengan konsep ekonomi konvensional yang kapitalistik. Dalam ekonomi kapitalis, pemisahan antara sektor finansial dengan sektor riil merupakan keniscayaan. Implikasi dari adanya pemisahan itu, ekonomi dunia sangat rawan terhadap gonjang-ganjing krisis. Hal ini disebabkan karena pelaku ekonomi menggunakan uang yang bukan untuk

kepentingan sektor riil, tetapi untuk kepentingan spekulasi mata uang semata. Akibat spekulasi tersebut, jumlah uang yang beredar sangat tidak berimbang dengan jumlah barang pada sektor riil.

Uang, dalam pandangan Islam, bukanlah komoditas (barang dagangan) melainkan alat pembayaran. Islam menolak keras segala jenis transaksi semu seperti yang terjadi di pasar uang atau pasar modal saat ini. Sebaliknya, Islam mendorong perdagangan internasional. Muhammad s.a.w, sebelum menjadi rasul, telah menjadi pedagang internasional sejak usia remaja. Ketika berusia belasan tahun, beliau telah berdagang ke Syam (Suriah), Yaman dan beberapa negara di kawasan Teluk. Lalu saat beliau menjadi rasul sekaligus menjadi kepala negara *Daulah Islamiyah* di Madinah, sejak awal kekuasaannya, umat Islam telah menjalin kontak bisnis dengan Cina, India, Persia dan Romawi. Bahkan hanya dua abad kemudian (abad kedelapan), para pedagang Islam telah mencapai Eropa Utara (Pertadireja, 1994).

Sepanjang keberadaan *daulah islāmiyyah* pada zaman Nabi Muhammad s.a.w. jarang sekali terjadi krisis ekonomi. Pernah sekali *daulah islāmiyyah* mengalami defisit, yaitu sebelum Perang Hunain, namun segera dilunasi setelah perang). Pada zaman kekhilafahan Islam, khususnya masa *Khulafāu al-Rāshidīn* juga begitu. Pada zaman khalifah Umar bin al-Khat^{ab} dan khalifah Uthman bin ‘Affan, APBN malah sering mengalami surplus. Apa rahasianya? Ini karena kebijakan moneter *daulah islāmiyyah* masa Rasulullah s.a.w. dan Kekhilafahan Islam pada masa para khalifah selalu terkait dengan sektor riil, terutama perdagangan (Pertadireja, 1994).

Ekonomi Islam Menjamin Kesejahteraan Umat Manusia

Dalam ekonomi Islam, kesejahteraan diukur berdasarkan pada prinsip terpenuhinya kebutuhan setiap individu masyarakat, bukan atas dasar penawaran dan permintaan, pertumbuhan ekonomi, cadangan devisa, nilai mata uang ataupun indeks harga-harga di pasar non-riil (Abul Hasan, 1992). Oleh karena itu, untuk mencapai terpenuhinya kebutuhan setiap individu masyarakat, maka ekonomi

Islam dilakukan dengan melaksanakan hal-hal berikut ini (Abul Hasan, 1987; Rahman, 1995):

1. Pengaturan atas Kepemilikan.

Kepemilikan dalam ekonomi Islam dibagi tiga. *Pertama*: kepemilikan umum. Kepemilikan umum meliputi semua sumber, baik yang keras, cair maupun gas, seperti minyak, besi, tembaga, emas dan gas; termasuk semua yang tersimpan di perut bumi dan semua bentuk energi, juga industri berat yang menjadikan energi sebagai komponen utamanya. Dalam hal ini, negara hanya mengeksplorasi dan mendistribusikannya kepada rakyat, baik dalam bentuk barang maupun jasa.

Kedua: kepemilikan negara. Kepemilikan negara meliputi semua kekayaan yang diambil negara seperti pajak dengan segala bentuknya serta perdagangan, industri dan pertanian yang diupayakan oleh negara, di luar kepemilikan umum. Semuanya ini dibiayai oleh negara sesuai dengan kepentingan negara.

Ketiga: kepemilikan individu. Kepemilikan ini dapat dikelola oleh individu sesuai dengan hukum syariah

2. Penetapan Sistem Mata Uang Emas dan Perak

Emas dan perak adalah mata uang dalam sistem Islam. Mengeluarkan kertas substitusi harus ditopang dengan emas dan perak, dengan nilai yang sama dan dapat ditukar, saat ada permintaan. Dengan begitu, uang kertas negara manapun tidak akan dapat didominasi oleh uang negara lain. Sebaliknya, uang tersebut mempunyai nilai intrinsik yang tetap dan tidak berubah.

Ditinggalkannya mata uang emas dan perak dan menggantikannya dengan mata uang kertas telah melemahkan perekonomian negara. Dominasi mata uang dolar yang tidak ditopang secara langsung oleh emas mengakibatkan struktur ekonomi menjadi sangat rentan terhadap gejolak mata uang dolar. Goncangan sekecil apapun yang terjadi di Amerika akan dengan cepat merambat ke seluruh dunia. Bukan hanya itu, gejolak politik pun akan berdampak pada naik-turunnya nilai mata uang akibat uang dijadikan komoditas (barang dagangan) di pasar uang yang penuh spekulasi (untung-untungan).

3. Penghapusan Sistem Ribawi

Ekonomi Islam melarang riba, baik *nasī'ah* maupun *fadl*; juga menetapkan pinjaman untuk membantu orang-orang yang membutuhkan tanpa tambahan (bunga) dari uang pokoknya. Di baitulmal (kas negara *daulah islāmiyah*), masyarakat dapat memperoleh pinjaman bagi mereka yang membutuhkan, termasuk para petani, tanpa ada unsur riba sedikitpun di dalamnya.

4. Pengharaman Sistem Perdagangan di Pasar Non-Riil.

Adapun yang termasuk ke dalam pasar non-riil (*virtual market*) saat ini adalah pasar sekuritas (surat-surat berharga); pasar berjangka (komoditas emas, CPO, tambang dan energi dan lain-lain) dan pasar uang. Ekonomi Islam melarang penjualan komoditi sebelum barang menjadi milik dan dikuasai oleh penjualnya, haram hukumnya menjual barang yang tidak menjadi milik seseorang. Haram memindahtangankan kertas berharga, obligasi dan saham yang dihasilkan dari akad-akad yang batil. Islam juga mengharamkan semua sarana penipuan dan manipulasi yang dibolehkan oleh Kapitalisme, dengan klaim kebebasan kepemilikan. Inilah Ekonomi Islam yang benar-benar akan menjamin kesejahteraan masyarakat dan bebas dari guncangan krisis ekonomi.

Solusi yang Ditawarkan

Dari uraian yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka solusi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

Pertama, Islam mendorong pertumbuhan ekonomi yang memberi manfaat luas bagi masyarakat (*pro-poor growth*). Islam mencapai *pro-poor growth* melalui dua jalur utama: pelarangan riba dan mendorong kegiatan sektor riil. Pelarangan riba secara efektif akan mengendalikan inflasi sehingga daya beli masyarakat terjaga dan stabilitas perekonomian tercipta. Bersamaan dengan itu, Islam mengarahkan modal pada kegiatan ekonomi produktif melalui kerja sama ekonomi dan bisnis seperti *mudā'arah*, *muzāra'ah* dan *musāqah*. Dengan demikian, tercipta keselarasan antara sektor riil dan moneter sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara berkesinambungan.

Kedua, Islam mendorong penciptaan anggaran negara yang memihak pada kepentingan rakyat banyak (*pro-poor budgeting*). Dalam sejarah Islam, terdapat

tiga prinsip utama dalam mencapai *pro-poor budgeting* yaitu: disiplin fiskal yang ketat, tata kelola pemerintahan yang baik dan penggunaan anggaran negara sepenuhnya untuk kepentingan publik. Tidak pernah terjadi defisit anggaran dalam pemerintahan Islam walau tekanan pengeluaran sangat tinggi, kecuali sekali saja, pada masa pemerintahan Nabi Muhammad s.a.w, yang disebabkan oleh peperangan. Bahkan pada masa Khalifah Umar dan Uthman terjadi surplus anggaran yang besar. Yang kemudian lebih banyak didorong adalah efisiensi dan penghematan anggaran melalui *good governance*. Di dalam Islam, anggaran negara adalah harta publik sehingga anggaran menjadi sangat responsif terhadap kepentingan orang miskin.

Ketiga, Islam mendorong pembangunan infrastruktur yang memberi manfaat luas bagi masyarakat (*pro-poor infrastructure*). Islam mendorong pembangunan infrastruktur yang memiliki dampak eksternalitas positif dalam rangka meningkatkan kapasitas dan efisiensi perekonomian. Nabi Muhammad s.a.w. membagikan tanah di Madinah kepada masyarakat untuk membangun perumahan, mendirikan permandian umum di sudut kota, membangun pasar, memperluas jaringan jalan, dan memperhatikan jasa pos. Khalifah Umar bin Khattab membangun kota Kufah dan Basrah dengan memberi perhatian khusus pada jalan raya dan pembangunan masjid di pusat kota. Beliau juga memerintahkan Gubernur Mesir, Amr bin Ash, untuk mempergunakan sepertiga penerimaan Mesir untuk pembangunan jembatan, kanal dan jaringan air bersih.

Keempat, Islam mendorong penyediaan pelayanan publik dasar yang berpihak pada masyarakat luas (*pro-poor public services*). Terdapat tiga bidang pelayanan publik yang mendapat perhatian Islam secara serius: birokrasi, pendidikan dan kesehatan. Di dalam Islam, birokrasi adalah amanah untuk melayani publik, bukan untuk kepentingan diri sendiri atau golongan. Khalifah Usman tidak mengambil gaji dari kantornya. Khalifah Ali membersihkan birokrasi dengan memecat pejabat-pejabat publik yang korup. Selain itu, Islam juga mendorong pembangunan pendidikan dan kesehatan sebagai sumber produktivitas untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Kelima, Islam mendorong kebijakan pemerataan dan distribusi pendapatan yang memihak rakyat miskin. Terdapat tiga instrument utama dalam Islam terkait distribusi pendapatan yaitu aturan kepemilikan tanah, penerapan zakat, serta menganjurkan qardul hasan, infak dan wakaf.

Penutup

Kajian tentang pertumbuhan (*growth*) dan pembangunan (*development*) ekonomi dapat ditemukan dalam konsep ekonomi Islam. Konsep ini pada dasarnya telah dirangkum baik secara eksplisit maupun implisit dalam Alquran, Sunnah Nabi s.a.w. maupun pemikiran-pemikiran ulama Islam terdahulu. Namun kemunculan kembali konsep ini, khususnya beberapa dasawarsa belakangan ini, berkaitan erat dengan kondisi negara-negara muslim yang terbelakang. Untuk menghadapi ini, diperlukan formula khusus dalam strategi dan perencanaan pembangunannya.

Kekhasan pertumbuhan dan pembangunan dalam ekonomi Islam ditekankan pada perhatian yang sangat serius pada pengembangan sumber daya manusia sekaligus pemberdayaan alam untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Ini tidak hanya diwujudkan dalam keberhasilan pemenuhan kebutuhan material saja, namun juga kebutuhan dan persiapan menyongsong kehidupan akhirat. Jadi, ekonomi Islam lebih ditekankan pada suatu konsep dan usaha untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, ekonomi Islam adalah jawaban tantangan peradaban dunia.

Daftar Pustaka

- Al-Ghazali, 1422 H. *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Usūl*, Jilid II. Kairo: Amiriyyah.
- Al-Ashfahani. TT. *Al-Aghāny*, Juz: IX. Kairo: Dār al-Sha'b.
- Chapra, Mohammad Umar, 1992. *Islam and the Economics Challenge*. Nigeria: The Islamic Foundation and The International Insitute of Islamic Thought.

- _____, 1996. *What is Islamic Economics?*. No. 9 in the IDB Prize Winners' lecture Series. Jeddah: IRTI/IDB.
- _____, 2000. *The Future of Economics: an Islamic Perspective*. Leicester: Islamic Foundation.
- Hasan, Abul and Sadeq, Muhammad. 1987. *Economic Growth in an Islamic Economy*, Dalam Development and Finance in Islam. Malaysia: International Islamic University Press.
- _____, dan Ghazali, Aidit. 1992. *Readings in Islamic Economic Thought*. Malaysia: International Islamic University Press.
- Karim, Adiwarman A. 2008. *Ekonomi Mikro Islam*. Edisi Ketiga. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Khan, Mohammad Akram. 1994. *An Introduction to Islamic Economics*. Virginia: International Institute of Islamic Thought.
- Mannan, Muhammad Abdul. 1986. *Islamic Economics: Theory and Practice*, Delhi: Idarah-I Adabiyat-I.
- Misanam, Munrokhim, dkk. 2008. *Ekonomi Islam*. Edisi I. Cet. I. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Naqvi, Syed Nawab Haider. 1994. *Islam, Economics, and Society*. New York: Kegan Paul International.
- Nuryanto. 2006. *Ekonomi Syariah Di Indonesia: Peluang dan Tantangan*, Yogyakarta: BPFE.
- Pertadireja, 1994. *Pengantar Ekonomika*. Yogyakarta: BPFE.
- Rahman, Afzalur, 1995. *Economic Doctrines of Islam*. Terj. Doktrin Ekonomi Islam. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.

Siddiqi, Mohammad Nejatullah. 1992. *Role of the State in the Economy: An Islamic Perspective*. UK: The Islamic Foundation.

Zamman, Hasanuz, 1984. *Economics Function of an Islamic State*. Leicester: The Islamic Foundation.

<http://www.kompas.com>, diambil pada tanggal 9 Nopember 2009.

<http://www.republika.com>, diambil pada tanggal 10 Nopember 2009.